BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan kajian yang dapat dikatakan sebuah ilmu baru, Ilmu hubungan internasonal pada dasarnya mempelajari mengenai bentuk interaksi antar negara dan bangsa berdaulat yang melewati batas batas teritorialnya. Hubungan internasional pada awalnya hanya bentuk kontak atau interaksi antar negara dalam masalah politik saja . namun, seiring berkembangnya zaman, negara maupun aktor non negara mulai tertarik pada isu- isu internasional yang mengalami transformasi akan isu-isu diluar politik, seperti isu ekonomi,lingkungan hidup,kejahatan transnasional, hak asasi manusia, terorisme, sosial dan kebudayaan

Menurut Holsti dalam bukunya "Politik Internasional : Suatu kerangka Analisis", hubungan internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang di sponsori pemerintah maupun tidak . hubungan internasional akan meliputi Analisa kebijakan luar negri atau proses politik antar bangsa ,tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu (Holsti dalam Jervis, 2005: 29).

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau masyarakat lainnya. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat

internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena semakin banyaknya komplekssitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara suatu negara satu dengan negara lain. Semakin banyaknya interdepedensi menyebabkan tidak adanya satu negara di dunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara semakin kompleks

Banyak definisi yang dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan studi Hubungan Internasional. Karen Mingst menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tntang interaksi diantara berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, dan para individu.

Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara bagian, organisasi internasional organisasi non-pemerintah, entitas sub nasional seperti pemerintah daerah dan individu (Wijatmadja, 2016 : 4-5).

Hubungan Internasional adalah sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perlaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya (McClelland, 2000: 54).

Menurut Robert Jackson & George Sorenson mengemukakan bahwa :

> "Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global" (Jackson, 2005:3).

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Studi hubungan internasional juga sering diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor-aktor di dunia. Interaksi ini terjadi berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan nasional dibagi menjadi empat jenis yaitu, ideologi, ekonomi, keamanan dan *prestige*. Untuk memperjuangkan kepentingannya, masing-masing negara mewujudkannya dalam kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dan juga kedalam negeri (Holsti dalam Jervis, 2005: 187-189).

Dari sejarah pekembangannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga

secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015 : 12).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, kami berpendapat bahwa hubungan internasional adalah interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh para aktor di panggung internasional, melintasi batas-batas kedaulatan negara. Aktor hubungan internasional mencakup aktor negara dan bukan negara. Semua interaksi yang dilakukan merupakan fokus kajian studi ilmu hubungan internasional. Oleh sebab itu, disiplin hubungan internasional merupakan disiplin yang interdisipliner dan bidang studi yang dipelajari sangat beragam. Bidang-bidang yang dikajinya mencakup banyak hal, seperti : politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, organisasi internasional, diplomasi, Analisa politik luar negeri, studi strategis, konflik dan perdamaian, dan ekonomi politik internasional. Ketika isu-isu baru muncul dalam hubungan internasional sebagai mata kuliah baru. Misalnya pada tahun 1980-an kita mengenal masalah-masalah lingkungan, globalisasi, dimensi internasional komunikasi dan lain-lain (Wijatmadja, 2016 : 7-8).

2.1.2 Kerjasama Bilateral

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi

> mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepentingan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan. Kerjasama bilateral yang terjalin antara dua negara bertujuan agar masing-masing negara dapat memenuhi kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga dapat mempererat hubungan persahabatan diantara negara-negara tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan kerjasama dengan negara lain maka perlu langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam kerjasama bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat didalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Seperti yang dituliskan oleh Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin mengatakan bahwa, dalam bentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.

2.1.3 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri atau bantuan pembangunan, merupakan salah satu instrumen ekonomi yang umum digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, terutama sejak akhir Perang Dunia II. Bantuan sebagian besar terdiri dari transfer uang, barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Bantuan militer dan bantuan pangan adalah salah satu bentuk awal

dari bantuan luar negeri. Di dekade terakhir proyek bantuan dengan tujuan meningkatkan infrastruktur di negara penerima telah menjadi semakin umum (Lengauer, 2011: 2).

Dalam banyak kasus, instrumen ekonomi dalam suatu kebijakan digunakan untuk mengubah perilaku dan sikap target baik kebijakan domestik maupun kebijakan luar negerinya dengan suatu tujuan yang jelas. Instrumen ekonomi tersebut dapat berupa *rewards* (hadiah) dan *coercion* (paksaan). Salah satunya dengan memberikan hibah atau bantuan tertentu, termasuk hibah militer. Ketika sikap target sesuai dengan yang diharapkan oleh pendonor, maka pendonor akan memberi rewards (hadiah) berupa bantuan yang berkesinambungan atau ketika sikap target tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara pendonor, negara pendonor akan mengeluarkan sikap *coercion* (paksaan) seperti dengan menghentikan bantuan tersebut dengan harapan negara penerima akan mempertimbangkan sikapnya kembali. Melalui cara ini, negara pendonor dapat memanipulasi bantuan luar negeri untuk tujuan politik atau aspek lain untuk mencapai kepentingan nasional negara pendonor.

Salah satu instrument penting dalam menghubungkan foreign aid dengan kebijakan luar negeri adalah dengan menggunakan pendekatan Edward S Manson. Menurut Manson bantuan luar negeri yang dilihat sebagai suatu instrument kebijakan luar negeri biasanya secara tidak langsung merujuk pada program-program bantuan luar negeri yang dibentuk terutama berdasarkan kepentingan kepentingan dari negara pemberi bantuan. Namun demikian pada hakikatnya hal ini tidak berarti bahwa kepentingan negara penerima bantuan dikesampingkan .

bantuan luar negeri yang diposisikan sebagai instrument kebijakan luar negeri dapat digunakan dalam analisis jika diasumsikan bahwa terdapat suatu kepentingan antara negara pemberi bantuan dan negara penerima bantuan .

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa terdapat kepentingan politik dan kepentingan ekonomi dalam distribusi bantuan. Manson juga menambahkan bahwa ada keterkaitan antara kepentingan ekonomi,politik dari bantuan dengan letak geografis . akan lebih mudah menganalisis kepentingan suatu negara terhadap bantuan bila menggunakan letak geografis sebagai indikator.

Dalam membahas bantuan luar negeri, pengertian bantuan luar negeri diartikan oleh sejumlah pakar. Dalam arti sempit, bantuan luar negeri diartikan oleh Robert Gilpin dalam bukunya *"The Political Economy of International Relations"* yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin (Holsti,2009:180).

Sedangkan dalam arti luas, K.J. Holsti mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima (Holsti,2009:181).

Secara historis, kebanyakan bantuan luar negeri telah diberikan sebagai bantuan bilateral langsung dari satu negara ke negara lain. Para donor juga memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, di mana sumber dayanya berasal dari beberapa donor (Radelet,2006:4).

Istilah *aid* atau *donor* dalam Bahasa inggris menyiratkan sesuatu bentuk altruisme atau kebijakan , tetapi dalam pengertian *foreign aid* , *development aid*

ataupun *development assistance* makna altruisme dan kebijakan itu tidaklah harus melekat, istilah ini merujuk pada bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara miskin dengan syarat-syarat tertentu.

Bantuan internasional/bantuan luar negeri praktis hanya menjadi sebuah alat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional. Alat kebijakan ini dalam pandangan realis dilihat sebagai sebuah hasil dari perang dingin yang digunakan dalam kompetisi diantara kekuatan *Great Power*. Bantuan internasional di pandang sebagai sebuah senjata kunci dalam perang dingin untuk memperbesar kemungkinan beraliansinya Negara-negara dunia ketiga kedalam salah satu kubu *great power*. Motivasi politik itulah yang menurut morghentau menjadi hal yang di pertimbangkan oleh donor saat memberikan bantuan luar negeri (Hattori, 2002: 642).

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu. Bantuan ini tidak hanya terbatas dalam bentuk material kebendaan saja, namun juga bisa disalurkan dalam bentuk jasa (White, 2001: 188)

Bantuan luar negeri tersebut digolongkan ke dalam tiga jenis bantuan, yaitu:

1) Bantuan Program *(Programme Aid)*

Bantuan Program *(Programme Aid)* adalah bantuan berupa devisa yang diperlukan untuk menutup kekosongan neraca pembayaran, yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan masyarakat, seperti bantuan pangan dan komoditas.

2) Bantuan Proyek *(Project Aid)*

Bantuan Proyek adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintahan berupa valuta asing yang ditukarkan ke dalam mata uang negara penerima dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek-proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa, serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru.

3) Bantuan Teknik *(Technical Assistance)*

Bantuan yang diberikan adalah berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan.Inti daripada bantuan teknik ini adalah dimungkinkannya ahli teknologi, yakni dengan mengisi kekosongan dalam bidang-bidang keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri (Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, Peluang dan Prosedur Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri. 1999 : 4).

Negara pendonor maupun negara yang mendapatkan bantuan pada dasarnya mendapatkan keuntungan dari serah terima bantuan yang dilaksanakan. Bantuan luar negeri memiliki azas timbal balik, di mana secara historis sulit untuk ditemukan fakta bahwa bantuan yang diberikan hanya berdasarkan kebaikan negara pendonor semata. Alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau institusi tertentu terutama ialah self interest politik, strategi dan ekonomi, sekalipun pada umumnya alasan itu berupa moral atau kemanusiaan. Jadi sulit ditemukan adanya bantuan yang diberikan tanpa dilandasi oleh kepentingan.

Dalam konteks penelitian ini, jenis bantuan yang dimaksud adalah bantuan

berupa pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas kapital fisik dan termasuk juga kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut Familoni, pembangunan infrastruktur dibedakan menjadi 2 yaitu ; infrastuktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi diantaranya sarana publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalar kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial mengacu kepada fasilitas dan mekanisme yang menjamin pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, distribusi pendapatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.

Bantuan luar negeri atau *foreign aid* yang biasa disebut juga *international aid* dapat diartikan sebagai perpindahan atau transfer sumber daya secara sukarela dari suatu negara ke negara lain, baik antar lembaga pemerintah mapun non-pemerintah. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa pemberian baik di bidang militer, teknis, dan keuangan yang diberikan baik di tingkat bilateral maupun multilateral (Lancaster,2007:6).

2..2 Kerangka Pemikiran

Suatu kerjasama (bantuan luar negeri) dapat terjadi karena adanya komitmen dari suatu individu untuk kesejahteraan bersama selain itu hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama , sejalan dengan masalah yang peneliti angkat tentang bantuan luar negeri Kuwait kepada Pondok Pesantren Darussalam Garut dalam bidang pendidikan dan sosial . Dasar dari adanya kerjasama ini terjalin dari adanya keinginan individu masyarakat Kuwait untuk memberikan bantuan kepada suatu lembaga pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan fasilitas terbaik kepada para pencari ilmu khusus nya para santri/ah untuk mencari ilmu khususnya ilmu agama sebagai pegangan hidup agar bermanfaat dunia dan akhirat, hasil dari kerjasama tersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi pihak individu masyarakat Kuwait (donatur) mereka mendapatkan kebahagiaan tersendiri dikarenakan mereka dapat mengamalkan ajaran Rasulullah SAW tentang memberikan kebaikan kepada sesama saudaranya, sedangkan bagi pihak Pondok Pesantren Darussalam Garut keuntungan yang mereka dapatkan yakni mereka di ringankan bebannya dalam urusan sarana prasarana sehingga para pengurus pondok pesantren fokus memikirkan Pendidikan para santrinya agar menghasilkan kualitas yang terbaik bagi bangsa dan agama.

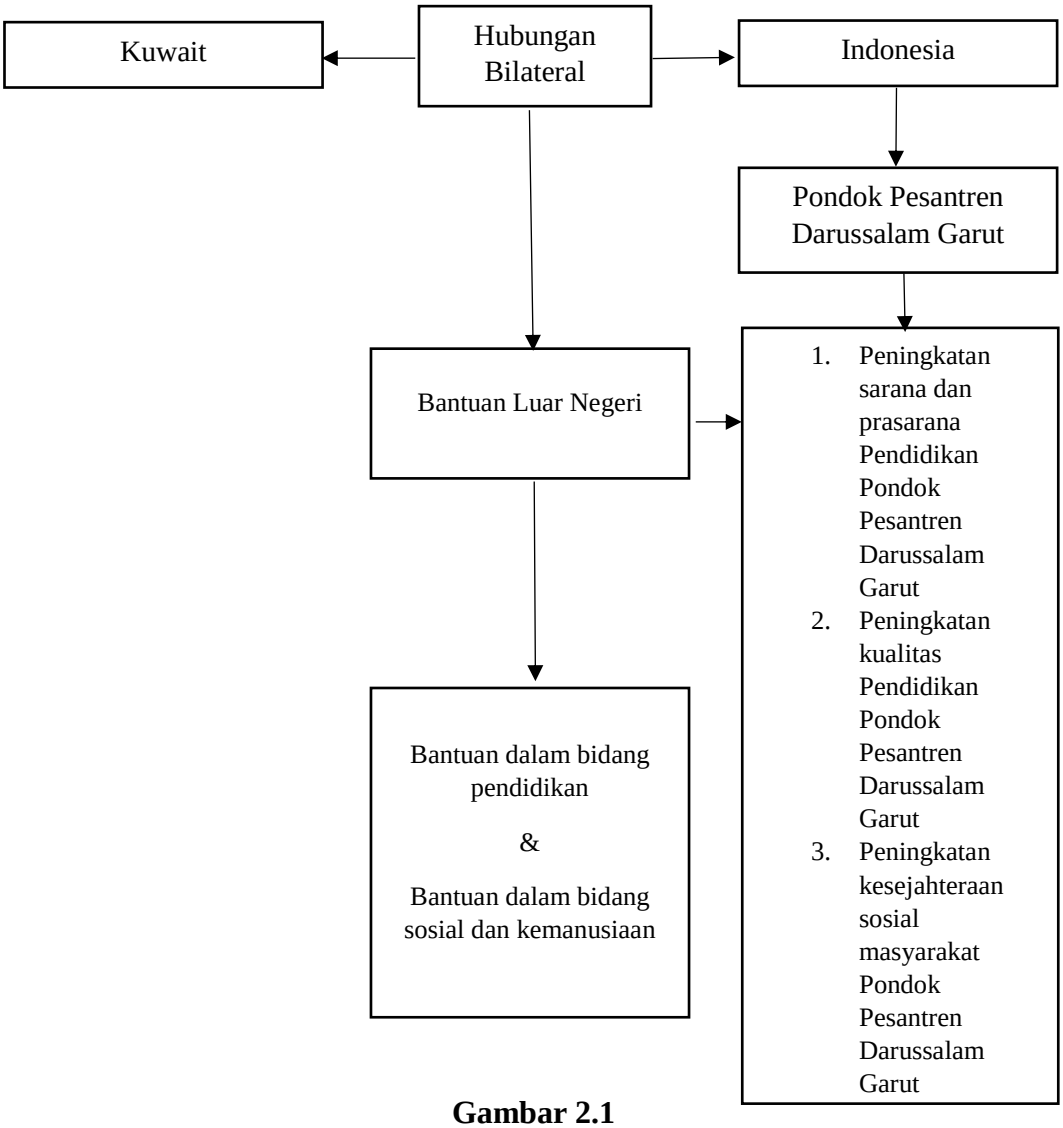
Bantuan luar negeri Kuwait untuk Pondok Pesantren Darussalam Garut dalam bidang Pendidikan dan Sosial terjalin karena adanya integrasi dari kedua belah pihak baik dari pihak donatur maupun pihak Pondok Pesantren Darussalam tersendiri hal tersebut dapat terjadi karena adanya kedekatan dan keharmonisan

yang sangat tinggi diantara pihak yang terlibat. Adanya kesamaan fikiran dan tujuan menjadi pokok utama kerjasama yang terjalin selama ini berjalan dengan baik.

Salah satu instrumen penting dalam menghubungkan *foreign aid* dengan kebijakan luar negeri adalah dengan menggunakan pendekatan Edward S Manson. Menurut Manson bantuan luar negeri yang dilihat sebagai suatu instrument kebijakan luar negeri biasanya secara tidak langsung merujuk pada program-program bantuan luar negeri yang dibentuk terutama berdasarkan kepentingan kepentingan dari negara pemberi bantuan. Namun demikian pada hakikatnya hal ini tidak berarti bahwa kepentingan negara penerima bantuan dikesampingkan . bantuan luar negeri yang diposisikan sebagai instrument kebijakan luar negeri dapat digunakan dalam analisis jika diasumsikan bahwa terdapat suatu kepentingan antara negara pemberi bantuan dan negara penerima bantuan .

Bentuk hubungan internasional antara pemerintah Kuwait dengan Pondok Pesantren Darussalam Garut yang selama ini terjadi berupa bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri yang diberikan pemerintah Kuwait di bidang Pendidikan ialah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan aula , pembangunan kelas , dan pembangunan asrama bagi santri, sedangkan di bidang sosial bantuan yang diberikan pemerintah Kuwait berupa pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan kaum dhuafa, pembangunan masjid, dan pembangunan rumah bagi warga yang kurang mampu.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran